

**PENGARUH IMPLEMENTASI PERMEN ESDM NO. 29 TAHUN 2016
TERHADAP PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN
DI KELURAHAN KEDATON BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Dian AyuMukti



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENGARUH IMPLEMENTASI PERMEN ESDM NO. 29 TAHUN 2016 TERHADAP PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN DI KELURAHAN KEDATON BANDAR LAMPUNG

(Dian Ayu Mukti)

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh implementasi peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 29 tahun 2016 terhadap pemberian subsidi listrik tepat sasaran di kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan Chi Kuadrat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan kategori keeratan sedang antara implementasi Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2016 dengan pemberian subsidi listrik tepat sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Namun pengaruh yang ada bersifat negatif karena empat dari lima indikator dalam penelitian ini berada dalam kategori kurang yakni tiga indikator dalam variabel X serta satu indikator dalam variabel Y.

Kata kunci : *Masyarakat, Peraturan Menteri, Subsidi Listrik.*

**PENGARUH IMPLEMENTASI PERMEN ESDM NO. 29 TAHUN 2016
TERHADAP PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN
DI KELURAHAN KEDATON BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

DIAN AYU MUKTI

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PENGARUH IMPLEMENTASI PERMEN ESDM
NO. 29 TAHUN 2016 TERHADAP PEMBERIAN
SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN DI
KELURAHAN KEDATON BANDAR LAMPUNG**

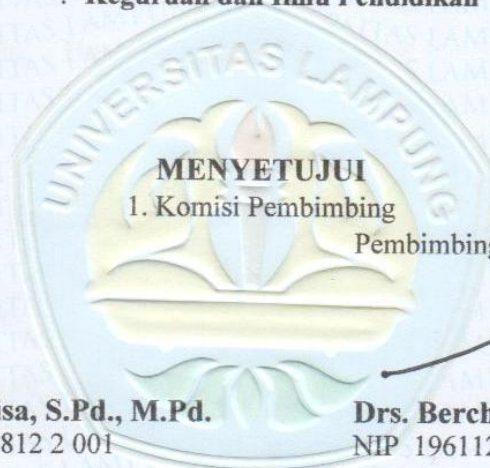
Nama Mahasiswa : **Dian Ayu Mukti**

No. Pokok Mahasiswa : **1413032022**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Yunistica Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.

NIP 19870602 200812 2 001

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.

NIP 19611214 199303 1 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Zulkarnain, M.Si.

NIP 19600111 198703 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.

NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

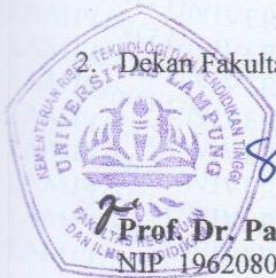
1. Tim Penguji

Ketua : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.** 

Sekretaris : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.** 

Penguji
Bukan Pembimbing : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.** 

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP. 19620804 198905 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Agustus 2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

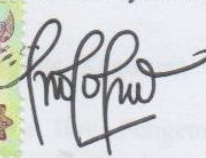
nama : Dian Ayu Mukti
NPM : 1413032022
program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Pemberi Pernyataan




Dian Ayu Mukti
NPM 1413032022

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 Maret 1996. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sobari dan Ibu Rosindawati.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis antara lain :

1. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Way Halim Permai yang diselesaikan pada tahun 2008
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014

Pada tahun 2014 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada bulan Juli 2017, penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Program Profesi Kependidikan (PPK) selama tujuh puluh hari di Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

**Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan
tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan
(Umar bin Khattab)**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT
Atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia-Nya,
Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti
Dan kecintaanku kepada :

Yang tercinta kedua orang tuaku,
Ayahanda Sobari dan Ibunda Rosindawati
Yang selalu menjadi semangat dalam hidupku yang tanpa lelah
dan tulus dalam mendidik, membesarkan, dan selalu mendoakanku
dalam sujudnya serta harapan di
Setiap tetesan keringatnya demi keberhasilan ku

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 Terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Kelurahan Kedaton Bandar Lampung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I, dan Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku Pembimbing II serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs Supriyadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung serta sebagai Pembahas I atas saran dan masukannya.
7. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan.
9. Bapak Kinhan HN, S.Sos. selaku Lurah Kedaton Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.

10. Terimakasih untuk masyarakat yang terdapat dalam data terpadu Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung yang telah bersedia membantu penulis dalam mengadakan penelitian
11. Petugas Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis mengadakan penelitian. .
12. Terimakasih untuk Ayahanda Sobari dan Ibunda Rosindawati, adikku Chintya Anggraini Putri, nenekku tersayang nenek Arsih, terimakasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang, doa, motivasi, serta ketulusan yang telah diberikan selama ini demi keberhasilanku.
13. Terimakasih kepada pamanku mamang Suharidi dan bibi Titin serta bu lek Manisah, sepupu-sepupuku Ipiy Yuliani, Endang Sunardiansyah, Wahyu Cahyani, Meta Purnamasari, Pebram Efendi, Indah Permatasari, Mukti Laksono serta keluarga besarku lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat dalam terselesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih untuk sahabat-sahabat terbaikku Sophi Rahma Uma, Seri Sudiwito, Desi Wulandari, Shoumy Aulia Pratiwi, Nur Khasanah, Mia Juliati, Septia Ningsih, Meri Sartika, Inka Attahu Ulfa, Inten Puteri Rezmi Zaini, Nadia Adista Putri, Danti Eka Wahyuni, Nur Afni Destia Fani, Nopita Sari, Siska Henita, Devita Rama Eryani, Danita Atasya, Eci Aprianti dan Ayu Safitri terimakasih atas doa serta dukungannya.

15. Teman-teman Seperjuangan PPK SMP Negeri 1 Batu Kebayan dan KKN Pekon Batu Kebayan, Lampung Barat tahun 2017, Kustina, Listiana, Nurul Kharomatul Lail, Ririn Kholidiana, Mufid Choirudin, Fandy Adhiatama, Yogi Friski, Khalidhia Faza dan Sabri Jabbari yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran baru selama masa KKN serta doa dan dukungan atas terselesainya skripsi ini..
16. Keluarga Civic Education angkatan 2014 semuanya tanpa terkecuali terimakasih telah memberikan cerita baru dalam perjalanan hidup ini. Semoga akhir perkuliahan ini bukan menjadi akhir dari pertemanan dan kebersamaan kita.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
- Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis

Dian Ayu Mukti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1. Lingkup Ilmu	9
2. Lingkup Subyek	10
3. Lingkup Obyek	10
4. Lingkup Tempat.....	10
5. Lingkup Waktu.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	11
1. Tinjauan tentang Kebijakan Publik.....	11
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
b. Implementasi Kebijakan	13

c. Model Implementasi.....	14
2. Subsidi Listrik Tepat Sasaran	22
a. Pengertian Subsidi.....	22
b.Subsidi Listrik Tepat Sasaran	23
3. Kesejahteraan	26
a. Pengertian Kesejahteraan	26
b. Ruang Lingkup Kesejahteraan	27
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	29
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Hipotesis	31

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Populasi dan Sampel	34
1. Populasi.....	34
2. Sampel.....	34
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	35
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	36
1. Definisi Konseptual.....	36
2. Definisi Oprasional	36
E. Rencana Pengukuran Variabel.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Teknik Pokok	39
2. Teknik Penunjang.....	39
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	40
H. Teknik Analisis Data.....	42

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah Penelitian.....	47
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	47
2. Penelitian Pendahuluan	48
3. Pengajuan Rencana Penelitian	48
4. Pelaksanaan Penelitian	49
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Singkat Kelurahan Kedaton Bandar Lampung	56
2. Batas Wilayah	56
3. Pendidikan Masyarakat	57
4. Kesejahteraan Masyarakat	58
C. Deskripsi Data	58
1. Pengumpulan Data	58
2. Penyajian Data	59
3. Pengujian Data	92
4. Pembahasan.....	100

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 114

B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Rumah Tangga Dalam Data Terpadu di Kelurahan Kedaton	5
2. Populasi Rumah Tangga Dalam Data Terpadu di Kelurahan Kedaton	34
3. Sampel Rumah Tangga Dalam Data Terpadu di Kelurahan Kedaton	35
4. Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh responden Item soal Ganjil	52
5. Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh responden Item soal Genap	53
6. Distribusi antara Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y)	53
7. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Kedaton	57
8. Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kedaton	58
9. Distribusi Skor Angket Indikator Komunikasi	59
10. Distribusi Frekuensi Indikator Komunikasi	63
11. Distribusi Skor Angket Indikator Sumberdaya	64
12. Distribusi Frekuensi Indikator Sumberdaya	68
13. Distribusi Skor Angket Indikator Disposisi	70
14. Distribusi Frekuensi Indikator Disposisi	73
15. Distribusi Skor Angket Implementasi Permen No. 29 Tahun 2016	75
16. Distribusi Frekuensi Implementasi Permen no. 29 tahun 2016	79
17. Distribusi Skor Angket Indikator Kesejahteraan Psikologi	80
18. Distribusi Frekuensi Indikator Kesejahteraan Psikologi	83
19. Distribusi Skor Angket Indikator Kesejahteraan Ekonomi	84
20. Distribusi Frekuensi Indikator Kesejahteraan Ekonomi	87
21. Distribusi Skor Angket Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran	88
22. Distribusi Frekuensi Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran	91
23. Perbandingan Jumlah Responden Pengaruh Implementasi Permen No. 29 Tahun 2016 Terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran	93

24. Daftar Tingkat Perbandingan Jumlah Responden Implementasi Permen No. 29 Tahun 2016 Terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran ...	93
25. Daftar kontingensi Implementasi Permen No. 29 Tahun 2016 Terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Rencana Judul Skripsi	117
2. Surat Keterangan dari Dekan FKIP Unila	118
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	119
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan	120
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal	121
6. Surat Telah Melaksanakan Seminar Proposal	122
7. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I	123
8. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II	124
9. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I	125
10. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II	126
11. Surat Rekomendasi Perbaikan	127
12. Surat Izin Penelitian.....	128
13. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	129
14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil	130
15. Surat Telah Melaksanakan Seminar Hasil.....	131
16. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing I.....	132
17. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing II.....	133
18. Kartu Perbaikan Hasil Pembahas.....	134
19. Surat Rekomendasi Perbaikan	135
20. Kisi-Kisi Angket	136
21. Angket Penelitian	137

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara besar yang memiliki jumlah populasi terbesar ke empat di dunia, yang tersebar dari sabang sampai marauke.

Negara bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Pasal 4 “Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Artinya, pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan dan tidak ada rakyat yang terlantar karena tidak memperoleh jaminan sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia NO. 11 Tahun 2009 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah maka diperlukan kebijakan publik sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Kebijakan dapat dimaknai lebih sebagai proses interaksi yang dilakukan Negara dengan rakyat” (dalam jurnal Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat, 2014). Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat dengan lingkup publik, yang merupakan lingkup bersama. Hal ini menggambarkan bahwa lingkup publik membutuhkan interaksi antara Negara dengan warganya dalam pengambilan keputusan yang salah satunya terkait masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

Kebijakan publik juga dapat berupa tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan umum (publik) yang memiliki tujuan dan bagaimana cara-cara mencapai tujuan itu, yang melalui proses interaksi dengan kekuatan sosial-politik. Pembuatan keputusan/kebijakan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Di dalam suatu era dimana sumber-sumber semakin langka; mengantisipasi masa depan selalu dikabuti dengan ketidakpastian; saling terbenturnya ramifikasi nilai-nilai dimana nilai baru dianggap superior dari nilai lama; sulitnya mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda dan sebagainya, hal ini telah menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan, utamanya para aparat pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang baik, dalam arti menyentuh kepentingan rakyat secara keseluruhan dan berdampak positif.

Menurut Hasil penelitian Sari Novita dan Fardianah Mukhyar (dalam Jurnal Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non-Pangan Penduduk Jawa Barat Trisna Subarna, 2012) menyatakan bahwa “Komposisi pengeluaran

rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai kesejahteraan penduduk”. Jenis pengeluaran rumah tangga dapat dibagi atas pengeluaran pangan dan pengeluaran non-pangan. Salah satu pengeluaran non-pangan di Indonesia adalah pengeluaran listrik rumah tangga.

Untuk membantu masyarakat kurang mampu menghemat pengeluaran listrik rumah tangganya pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan subsidi listrik untuk pengguna listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA namun pada awal tahun 2017 pemerintah mencabut subsidi listrik untuk rumah tangga pengguna 900 VA dikarenakan masih banyak masyarakat pengguna listrik 900 VA yang masuk dalam kategori mampu juga mendapatkan subsidi listrik. Karena pencabutan subsidi listrik untuk pengguna 900 VA banyak masyarakat kurang mampu merasa terbebani oleh pengeluaran listrik keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat kurang mampu, menyatakan bahwa “setelah subsidi listrik dicabut pengeluaran listrik keluarga menjadi besar dan hal tersebut membuat rumah tangga tersebut kesulitan memenuhi kebutuhan yang lain”. Artinya, pengeluaran listrik rumah tangga berpenghasilan kecil sangat membebani keluarga tersebut dan sangat dibutuhkan kebijakan pengganti dari pemerintah untuk rumah tangga berpenghasilan kecil agar diringankan beban pengeluaran listriknya.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menangani masalah pengeluaran listrik rumah tangga adalah pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan Pasal 4 yang menegaskan bahwa “untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu”. Salah satu tujuan dari kebijakn publik adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Subsidi listrik dalam APBN 2018 mendapatkan anggaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan subsidi Energi yang lain yakni sebesar 47,6 Triliun rupiah sedangkan untuk subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mendapatkan anggaran 46 triliun. Subsidi Listrik tepat sasaran diperuntukkan kepada masyarakat pengguna listrik tidak mampu dengan pengguna daya 450 VA dan 900 VA. Sebelum Pemerintah membuat kebijakan tentang Subsidi Listrik Tepat Sasaran, pemerintah juga pernah menetapkan kebijakan subsidi listrik untuk pengguna listrik 450 VA dan 900 VA namun, banyak penerima subsidi dengan daya 900 VA yang bukan merupakan golongan masyarakat tidak mampu juga mendapatkan subsidi listrik. Pada kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran rumah tangga dengan daya 450 VA masih diberikan subsidi tanpa perlu mengajukan ke Kelurahan. Perbedaan yang terdapat pada kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dengan kebijakan subsidi listrik sebelumnya terdapat pada mekanismenya, jika dalam kebijakan subsidi listrik sebelumnya rekening rumah tangga penerima langsung dipotong dengan subsidi listrik yang didapatkan maka, kebijakan subsidi listrik tepat sasaran didapatkan setelah rumah tangga tidak mampu mengajukan subsidi ke Kelurahan.

Mekanisme untuk mendapatkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016. Masyarakat tidak mampu dimaksudkan untuk rumah tangga yang terdapat dalam data terpadu program yang ditetapkan Menteri Sosial bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data terpadu yang dipergunakan sebagai dasar pemberian subsidi listrik tepat sasaran ini berasal dari pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilakukan pada tahun 2015 dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016.

Tabel 1. Data rumah tangga yang terdaftar dalam data terpadu program yang ditetapkan Menteri Sosial di Kelurahan Kedaton

No	Nama Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga
1	Lingkungan 1	133 Rumah Tangga
2	Lingkungan 2	135 Rumah Tangga
3	Lingkungan 3	359 Rumah Tangga
TOTAL		627 Rumah Tangga

Sumber: Data kelurahan kedaton tahun 2017

Implementasi Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2016 diharapkan dapat terlaksana dengan optimal agar masyarakat dapat merasakan manfaat mendapatkan subsidi listrik. Implementasi memiliki tahapan yang membuat pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang ada dapat berjalan dengan baik, tahapan tersebut antara lain: Tahap yang pertama yakni tahap

Interpretasi atau tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang bersifat teknis dan operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan. Hasil dari tahap interpretasi permen no. 29 tahun 2016 adalah petunjuk teknis pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran yang dikeluarkan oleh direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang dikeluarkan tahun 2016.

Tahap Selanjutnya yakni tahap pengorganisasian yaitu, tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni; lembaga pelaksana kebijakan; anggaran yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan tata kerja dan Penetapan manajemen kerja. Tahap pengorganisasian peraturan menteri diatur dalam surat edaran Kementerian dalam Negeri No. 671/2322/SJ yang ditujukan untuk pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

lalu tahap yang terakhir adalah tahap aplikasi atau tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan. Setelah melakukan wawancara dengan warga di RT 14 Lingkungan 3 yang terdaftar dalam data terpadu di Kelurahan kedaton masih banyak diantara mereka yang belum mengetahui cara mendapatkan subsidi sesuai dengan peraturan Menteri no. 29 tahun 2016. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Permen No. 29 Tahun 2016 dan adakah Pengaruh Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun

2016 terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pentingnya subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu.
2. Kurangnya Pemahaman masyarakat mengenai cara mendapatkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 29 Tahun 2016
3. Kurangnya Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 29 Tahun 2016 di Kelurahan Kedaton dikarenakan kurangnya sosialisasi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahannya dibatasi pada masalah implementasi peraturan menteri ESDM nomor 29 tahun 2016 dan pengaruhnya terhadap pemberian subsidi listrik tepat sasaran masyarakat yang terdapat dalam data terpadu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang ada, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Pengaruh Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016

terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengaruh Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung tahun 2018.

F. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi dan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis mengembangkan konsep ilmu Pendidikan Khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kajian Hukum dan Kemasyarakatan terjadi karena terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS, FKIP Universitas Lampung

b. Bagi Pemerintah

kebijakan tentang subsidi listrik tepat sasaran dan peraturan

Menteri tentang mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik

harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan cara mengajukan subsidi tarif tenaga

listrik sesuai dengan peraturan Menteri yang sudah ditetapkan.

d. Bagi Calon Guru PPKn

Dalam menyikapi masalah tersebut sebagai calon guru PPKn

harus ikut serta dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan

Menteri tersebut

G. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini khususnya PPKn, menggunakan kajian Hukum dan Kemasyarakatan karena setiap warga negara atau masyarakat wajib taat pada hukum dan UU, sedangkan lembaga sosial dan masyarakat seharusnya mengimplementasikan dengan baik.

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah kajian Ilmu Pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang Hukum dan Kemasyarakatan.

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah rumah tangga yang terdaftar dalam data terpadu program kementerian sosial di kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Pengaruh Implementasi Permen No. 29 Tahun 2016 terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung.

4. Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat atau wilayah penelitian adalah di kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yaitu sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 18 april 2018 dengan nomor surat: 2871/UN26.13/PN.01.00/2018 sampai dengan 4 mei 2018.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori berisikan tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian.

1. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewit dalam Agustino (2012:6) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “keputusan tetap yang dicirikan dengan konstitensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Menurut Thomas R.Dye dalam Agustino (2012:7) “Kebijakan Publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”

Definisi lain mengenai kebijakan publik disampaikan oleh Carl Frierich dalam Agustino (2012:7) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Pengertian Kebijakan Publik menurut James Anderson dalam Agustino (2012:7) kebijakan Publik adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam menangani masalah publik.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012:139), mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai :

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

“Pelaksanaan Keputusan Kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksklusif yang penting dan keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Pendapat lain mengenai Implementasi Kebijakan disampaikan oleh Ramesh dalam Suharno (2013:26), “Implementasi

Kebijakan (*policy Implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”.

Menurut Leo Agustino (2012:139) menyatakan bahwa “Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Berdasarkan penjelasan oleh beberapa ahli diatas dapat diartikan bahwa Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan berbentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaksana terkait untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

c. Model Kebijakan Publik

Dalam analisis kebijakan publik telah banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan untuk menganalisis bagaimana proses tersebut berlangsung secara efektif, maka hal tersebut dapat dilihat dari model implementasi kebijakan. Berikut beberapa model implementasi menurut para ahli:

1) Model yang dikembangkan oleh George C. Edward III

Edward III (dalam Subarsono, 2011:90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) **Komunikasi**

Keberhasilan Komunikasi suatu implementasi kebijakan publik mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) **Sumberdaya**

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) **Disposisi**

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan

tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2012:141) ada enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yakni:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas engan sosio-ukur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan public hingga titik yang dikatakan berhasil.

b) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informasi yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Cangkupan atau luas wilayah perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cangkupan implementasi kebijakan, maka semakin banyak pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap/Kecenderungan (disposition) agen pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang sesuai dengan persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan *top down* (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang ingin warga selesaikan.

e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja

implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3) Model yang dikembangkan oleh Merilee S, Grindle

Model ini dikenal dengan *Implementations as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle (dalam Leo Agunstino, 2012:141), ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan public. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a) *Content of Policy*

1. Kepentingan yang mempengaruhi

Poin ini beranggapan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejumlah kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang akan diketahui lebih lanjut.

2. Tipe Manfaat

Tipe manfaat bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Poin ini menjelaskan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi. Kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada poin ini dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5. Pelaksanaan program

Dalam menjalankan suatu program atau kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

6. Sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b) *Context of Policy*

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan gagal.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka yang akan dijelaskan dalam poin ini adalah karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Poin lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

2. Subsidi Listrik Tepat Sasaran

a. Pengertian Subsidi

Definisi Subsidi menurut Todaro dan Smith (2003:811), subsidi adalah “sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor di dalam suatu industri untuk menghindari penurunan kinerja industri yang bersangkutan”.

Adapun menurut Suparmoko (2003:34), “subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah”.

Menurut Milto H. Spenser dan Orley M. Amos Jr. (1993:464), menyatakan bahwa “subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga murah”.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, pasal 1 poin 16 menyatakan bahwa “Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat”

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka subsidi dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk masyarakat dengan harga jual yang rendah.

b. Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Subsidi listrik tepat sasaran merupakan pemberian subsidi berupa pemotongan pembayaran tarif listrik oleh pemerintah untuk

masyarakat yang kurang mampu setelah melalui mekanisme pengajuan. Pemotongan yang didapatkan oleh masyarakat adalah pemotongan pembayaran per kWh, jika pengguna listrik 900 VA seharusnya membayar biaya listrik sebesar Rp. 1.352 per kWh maka rumah tangga kurang mampu yang mendapatkan subsidi ia hanya harus membayar Rp. 862 per kWh. Pemberian subsidi listrik tepat sasaran diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan membantu mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga. Kebijakan mengenai subsidi listrik tepat sasaran per 1 Januari 2017, diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga 900 VA yang terdapat dalam data terpadu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ditetapkan dalam sidang yang dilaksanakan oleh Komisi VII pada tanggal 22 September 2016 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2017.

Ketidaktepatan pemberian subsidi listrik pada periode 2012-2016 disebabkan banyaknya golongan mampu yang menikmati subsidi listrik dibandingkan masyarakat miskin atau kurang mampu adalah salah satu faktor yang membuat pemerintah membuat subsidi listrik tepat sasaran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 46 juta rumah tangga menerima subsidi listrik, yakni 23 juta rumah tangga pengguna daya 450 VA dan 23 juta rumah tangga pengguna daya 900 VA dan hanya 25.7 juta rumah tangga yang memiliki kesejahteraan 40% terendah atau kurang mampu

yang layak mendapatkan subsidi listrik. Dari 23 juta Pengguna daya 900 VA hanya 4,05 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi listrik. Artinya ada sekitar 19 juta rumah tangga 900 VA yang tidak berhak membayar listrik secara bersubsidi, jadi banyak masyarakat dengan kesejahteraan yang baik atau dapat dikatakan mampu mendapatkan subsidi listrik. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan baru yang dirasa cukup efisien untuk menangani permasalahan yang ada, adapun kebijakan tersebut adalah subsidi listrik tepat sasaran.

Dalam upaya memaksimalkan subsidi listrik tepat sasaran, pemerintah membuat perbedaan dengan subsidi listrik sebelumnya yakni mekanismenya, jika pada subsidi sebelumnya rekening rumah tangga penerima subsidi langsung mendapatkan potongan dari subsidi yang didapatkan, maka subsidi listrik tepat sasaran didapatkan setelah rumah tangga yang terdapat dalam data terpadu melakukan pengaduan serta pengajuan di posko pengaduan yang berada di kelurahan masing-masing. Mengenai mekanisme dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh penerima subsidi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuat kebijakan berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 29 tahun 2016. Didalam peraturan menteri ada banyak tugas yang ditanggungjawabkan kepada pemerintah dan yang paling

dominan adalah pemerintah daerah sebagai agen utama dalam pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran, adapun pemerintah daerah yang berkontribusi adalah kecamatan dan kelurahan serta PT PLN Persero sebagai penyedia listrik Negara.

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Terdapat banyak pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subyektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sukirno, 1985 dalam Sianipar, 1997 dalam Sunarti, 2006). Menurut Sawidak (dalam Sunarti, 2006:2-13) “Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima”. Menurut Rambe (dalam Sunarti, 2006:2-13) “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat”. Pendapat lain dikemukakan oleh Bubolz dan Sontag (dalam Sunarti, 2006:2-13) “Kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika

terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup”.

Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan kepuasan setiap warganegara dalam merealisasikan pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmani, rohani dan sosial.

b. Ruang Lingkup Kesejahteraan

1) Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Park (dalam Sunarti, 2006:2-14) “Kesejahteraan ekonomi sebagai dari suatu keluarga biasanya didefinisikan sebagai tingkat kepuasan atau tingkat pemenuhan yang diperoleh oleh rumah tangga”. Dalam pembahasan perilaku ekonomi rumah tangga, tujuan dari pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah kepuasan dan kemanfaatan atau kegunaan “utility”. Kepuasan dan manfaat merupakan istilah lain dari kesejahteraan (*well-being*) yang sering digunakan oleh sosiologi dan home-ekonomist namun mengacu pada hal yang sama. Analisis perilaku ekonomi membahas bagaimana pengelolaan sumberdaya rumah tangga, materi dan waktu, pengelolaan untuk berbagai kepentingan (konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan dan liburan) untuk senantiasa menjaga keseimbangan rumah tangga. Pembahasan ini meliputi pandangan keluarga (rumah tangga) terhadap kerja dan

liburan, konsep tabungan, human capital sebagai tabungan, nilai ekonomi fertilitas, nilai ekonomi perkawinan dan perceraian.

2) Kesejahteraan Sosial

Beberapa komponen dari kesejahteraan sosial diantaranya adalah penghargaan (*self esteem*) dan dukungan sosial. Penghargaan merupakan pusat pengembangan sosial agar berfungsi secara optimal, kreatif, produktif, terampil dan optimis. Sedangkan dukungan sosial merupakan factor penting bagi kesejahteraan. Model ketahanan keluarga yang diajukan oleh Schumm (dalam Sunarti, 2006:2-14) meliputi orientasi agama, apresiasi (penghargaan, kasih sayang), waktu kebersamaan, komunikasi dua arah, resolusi penanganan krisis dan komitmen terhadap anggota keluarga.

3) Kesejahteraan Psikologi

Menurut Gauvin dan Spence (dalam Sunarti, 2006:2-14) “Kesejahteraan psikologi merupakan fenomena multidimensi yang terdiri dari fungsi emosi dan fungsi kepuasan hidup”. Menurut Ryff (Ryff dan Keyes, 1995) “Kesejahteraan psikologis merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari serta mengarah pada ungkapan perasaan-perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh

individu sebagai hasil dari pengalamannya”. Kesejahteraan psikologis berhubungan dengan kepuasan pribadi, *engagement*, harapan, rasa syukur, stabilitas suasana hati, pemaknaan terhadap diri sendiri, harga diri, kegembiraan, kepuasan dan optimisme, termasuk juga mengenali kekuatan dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Kebahagiaan adalah bagian dari keadaan sejahtera dan kepuasan hati, yaitu kepuasan yang menyenangkan dan timbul apabila kebutuhan dan harapan individu terpenuhi.

B. Kajian Penelitian yang relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Teja Purna, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yaitu dengan judul “Analisis Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 terhadap Pengelolaan Aset Tetap Daerah studi kasus pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Mesuji”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan peraturan tersebut dalam mengelola aset tetap daerah serta memberikan rekomendasi strategis dalam pengelolaan Aset Tetap Daerah berdasarkan kondisi yang ada di Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Dinas dinas pekerjaan umum Kabupaten Mesuji. Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Perbedaan yang jelas dengan penulis adalah terletak pada peraturan

Menteri yang mengeluarkan serta metode hingga pendekatan.

Persamaan yang terlihat dari penelitian ini adalah melihat pengaruh pada peraturan menteri.

2. Tingkat Nasional

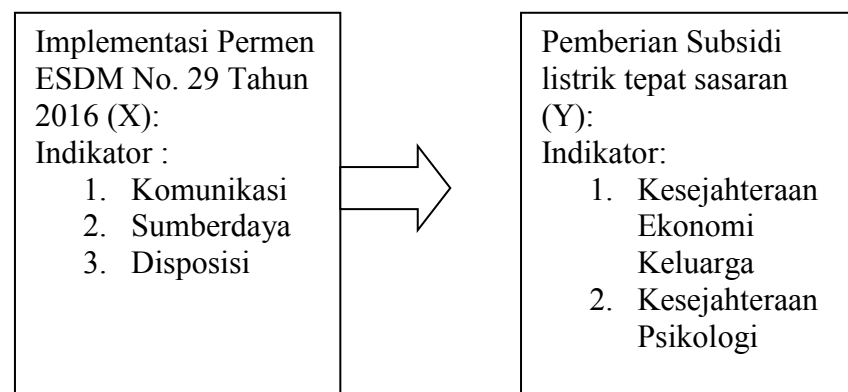
Penelitian yang dilakukan oleh Riska Ambar Putri, fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba) di PT ANTAM (Persero) TBK. Pongkor-Gold Mining Business Unit Bogor Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran mengenai penerapan SMKP dalam Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2014. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara verifikasi dokumen, wawancara kepada tenaga kerja yang bersangkutan, observasi ke lapangan serta studi kepustakaan terkait SMKP. Perbedaan yang jelas dengan penulis adalah terletak pada metode dan pendekatan penelitian yang hanya saja yang sama yaitu Implementasi Peraturan Menteri ESDM.

C. Kerangka Pikir

Mekanisme/cara Pemberian Subsidi Listrik dirasa penting untuk diketahui masyarakat utamanya masyarakat kurang mampu atau miskin. Karena dengan mendapatkan subsidi listrik membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan membantu mewujudkan kesejahteraan

dalam keluarga baik kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan psikologi. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Mengenai Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik. Salah satu yang diharapkan oleh pemerintah agar dapat membantu mengoptimalkan Implementasi ini adalah keikutsertaan masyarakat dan petugas Kelurahan, kecamatan dan PT PLN Persero sebagai penyedia listrik Negara. Dengan keikutsertaan masyarakat serta lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab didalamnya diharapkan dapat membuat subsidi listrik tepat sasaran dapat berjalan dengan baik dan berguna bagi masyarakat terkhusus masyarakat yang kurang mampu.

Berikut ini bagan kerangka pikir :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, teori dan kerangka pikir, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak ada pengaruh implementasi Permen ESDM no. 29 tahun 2016 terhadap pemberian subsidi listrik tepat sasaran di Kelurahan Kedaton kota Bandar Lampung

H_1 : Ada pengaruh implementasi Permen ESDM no. 29 tahun 2016 terhadap pemberian subsidi listrik tepat sasaran di Kelurahan Kedaton kota Bandar Lampung.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh implementasi Permen ESDM No. 29 tahun 2016 terhadap pemberian subsidi listrik tepat sasaran di kelurahan Kedaton kota Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008: 14) “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:117). pengertian “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi adalah kelompok yang menarik peneliti, dimana kelompok tersebut oleh peneliti dijadikan objek untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdapat dalam data terpadu kementerian sosial di kelurahan kedaton kota Bandar lampung.

Tabel 2. Populasi Rumah Tangga Dalam Data Terpadu di Kelurahan Kedaton.

No	Nama Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga
1	Lingkungan 1	133 Rumah Tangga
2	Lingkungan 2	135 Rumah Tangga
3	Lingkungan 3	359 Rumah Tangga
TOTAL		627 Rumah Tangga

Sumber: Data kelurahan Kedaton tahun 2017/2018

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil menggunakan teknik tertentu untuk menentukan anggota yang dianggap mewakili populasi.

Menurut Arikunto (2010:38), yang menyatakan bahwa “Untuk ancer-ancer, jika subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika populasinya lebih dari 100 maka diambil 10-15% ataupun lebih.

Dalam penelitian ini diambil sampel 10% dari jumlah keluarga yang masuk dalam data penanganan fakir miskin di Kelurahan Kedaton berjumlah 627 keluarga yang tersebar di 3 lingkungan di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung jadi sampel penelitian ini : $10\% \times 627 = 62,7$ keluarga dibulatkan menjadi 63 keluarga.

Tabel 3. Sampel rumah tangga yang terdaftar dalam data terpadu program yang ditetapkan Menteri Sosial di Kelurahan Kedaton

No	Nama Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah sampel
1	Lingkungan 1	133 Rumah Tangga	13
2	Lingkungan 2	135 Rumah Tangga	14
3	Lingkungan 3	359 Rumah Tangga	36
TOTAL		627 Rumah Tangga	63 Rumah tangga

Sumber: Data kelurahan Kedaton tahun 2017

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Implementasi Permen ESDM No. 29 tahun 2016.

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah subsidi listrik tepat sasaran.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan berbentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaksana terkait untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
- b. Subsidi listrik tepat sasaran merupakan pemberian subsidi berupa pemotongan pembayaran tarif listrik oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu setelah melalui mekanisme pengajuan.

2. Definisi Operasional

a. Variabel X

Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi (Suryabrata, 2010:29).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 adalah komunikasi antara implementor dengan target sasaran, sumber daya dan disposisi.

Sedangkan indikatornya adalah:

1. Komunikasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group)

2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

b. Variabel Y

Definisi dari variabel yang mempengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pemberian subsidi listrik tepat sasaran dengan indikator:

1. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga, Pemberian subsidi listrik tepat sasaran diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan membantu mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga.
2. Kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari serta mengarah

pada ungkapan perasaan-perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari pengalamannya

E. Rencana Pengukuran Variabel

Pengukuran dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket tertutup, yaitu angket yang disusun dengan menyediakan alternatif jawaban sehingga memudahkan responden dalam memberi jawaban dan memudahkan peneliti dalam menganalisa.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdapat dalam data terpadu kementerian sosial di kelurahan kedaton.

Setiap item memiliki tiga alternatif jawaban yang berbeda-beda. Menurut Natsir (1988:404) skor yang diberikan adalah :

- a. untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberikan skor 3
- b. untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberikan skor 2
- c. untuk jawaban yang tidak sesuai harapan diberikan skor 1

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang terpercaya dipergunakan berbagai macam teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi dalam dua golongan besar yaitu:

1. Teknik Pokok

a. Angket

Teknik angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan responden. Dengan maksud menjangkau data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Angket yang berisi daftar pertanyaan yang secara tertulis terdiri dari item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

Sasaran angket adalah rumah tangga yang terdapat dalam data terpadu penanganan fakir miskin di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung.

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Teknik penunjang dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Dengan wawancara inilah penulis memperoleh informasi yang diinginkan secara langsung melalui tanya jawab dan bertatap muka dengan informan sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih jelas.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penggunaan teknik dokumentasi adalah sebagai bukti yang mendukung keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2008:363) “Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Pada penelitian ini yang digunakan adalah validitas logis (logical validity). Untuk mengetahui validitas logis maka pembuatan alat ukur dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen berdasarkan pada konsep-konsep teoritis yang ada untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada para ahli atau dosen pembimbing

2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:160) “Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik”. Untuk membuktikan kemantapan data maka akan diadakan uji coba angket reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpulan data instrumen tersebut sudah baik.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket untuk uji coba kepada 10 diluar responden.
2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item genap dan item ganjil.

3. Selanjutnya mengkorelasikan kelompok genap dan kelompok ganjil dengan menggunakan rumus product moment yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dengan pengertian:

r_{xy} = koefisien korelasi antara x dan y

x = variabel bebas

y = variabel terikat

N = jumlah populasi

- a. Kemudian untuk mengetahui reliabilitas instrumen digunakan rumus Spermans Brown sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Dengan keterangan :

r_{xy} : reliabilitas instrumen

r_{gg} : koefisien korelasi item ganjil dan item genap

- b. Hasil analisis pengolahan data kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas menurut Manasse Malo dalam Sujatmi (2013:57) dengan kriteria sebagai berikut:

0,90 – 1,00 = Reliabilitas Cukup

0,50 – 0,89 = Reliabilitas Sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas Rendah

H. Teknik Analisis Data

Mengalisis data merupakan suatu langkah kritis dalam penelitian dengan tujuan untuk mencari kebenaran data tersebut dan mendapatkan suatu kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisis data kuantitatif dengan menggunakan data-data berbentuk angka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Teknik Analisis Persentase

Teknik analisis persentase ini digunakan untuk mengetahui data hasil angket tentang pengaruh implementasi permen no. 29 tahun 2016 terhadap pemberian subsidi tarif tenaga listrik di kelurahan kedaton kota Bandar lampung, namun sebelumnya untuk mengolah dan menganalisis data, menggunakan rumus :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Tinggi

NR = Nilai Rendah

K = Kategori

(Sutrisno Hadi,1981:12)

Selanjutnya untuk mengelola dan menganalisis data digunakan rumus

Persentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variabel yang
bersangkutan

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi kategori variabel

Selanjutnya untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh
maka digunakan dengan kriteria yang ditafsirkan sebagai berikut :

76% - 100 % = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Kurang baik

0% - 39% = Tidak baik

(Suharsimi Arikunto, 2010:196)

2. Pengujian Keeratan Hubungan

Pengujian keeratan hubungan dengan rumus Chi-kuadrat sebagai
berikut :

$$x^2 = \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan :

x^2 = Chi Kuadrat

$$\sum_{i=1}^b = \text{Jumlah baris}$$

$$\sum_{j=1}^k = \text{Jumlah kolom}$$

O_{ij} = Banyaknya data yang diharapkan

E_{ij} = Banyaknya data hasil pengamatan

Setelah menggunakan rumus Chi-Kuadrat maka data kan diuji dengan rumus koefisien korelasi yaitu :

$$c = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

Keterangan :

c : Koefisien Kontingensi

x^2 : Chi-Kuadrat

n : Jumlah sampel

Supaya harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi faktor-faktor, sehingharganya C dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum yang dapat terjadi. Harga C maksimum ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{M-1}{M}}$$

Keterangan :

C_{maks} : Koefisien kontingen maksimum

M : Harga minimum antara banyaknya baris dan kolom dengan kriteria

Sehingga dengan uji hubungan ini dapat diketahui bahwa “makin dekat harga C pada C_{maks} , makin besar derajat asosiasi antara faktor”. Kemudian setelah menggunakan rumus koefisien kontingensi C dan C_{maks} , sehingga data C_{maks} tersebut selanjutnya dijadikan patokan untuk menentukan tingkat keeratan pengaruh, dengan langkah sebagai berikut :

$$\epsilon_{KAT} = \frac{C}{C_{maks}}$$

Maka dapat diperoleh klasifikasi atau pengkategorian sebagai berikut:

0,00 – 0,19 = kategori sangat rendah

0,20 – 0,39 = kategori rendah

0,40 – 0,59 = kategori sedang

0,60 – 0,79 = kategori kuat

0,80 – 1,00 = kategori sangat kuat

(Sugiyono 2011:257)

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan hasil pengujian pengaruh yang telah diuraikan tentang Pengaruh Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara implementasi Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2016 dengan pemberian subsidi listrik tepat sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Namun Pengaruh antara Implementasi Permen No. 29 Tahun 2016 dengan Subsidi Listrik Tepat Sasaran bersifat negatif karena berdasarkan indikator-indikator variabel X yakni indikator komunikasi, sumberdaya dan disposisi serta indikator kesejahteraan psikologi pada variabel Y berada pada kategori kurang terlaksana. Semakin baik implementasi Peraturan Menteri nomor 29 tahun 2016 maka kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan psikologi masyarakat akan semakin baik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Lampung

Kepada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral hendaknya melakukan komunikasi kepada masyarakat secara langsung mengenai cara mendapatkan subsidi listrik sesuai dengan peraturan menteri nomor 29 tahun 2016 agar masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan manfaat dari mendapatkan subsidi listrik secara lebih optimal.

2. Kelurahan Kedaton

Kepada Kelurahan Kedaton baik petugas yang melayani pengajuan subsidi listrik maupun Lurah Kedaton diharapkan lebih mengoptimalkan tugas yang sudah diamanatkan sehingga pemberian subsidi listrik dapat berjalan dengan baik dan masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan manfaat mendapatkan subsidi listrik

3. Masyarakat

Kepada Masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kedaton diharapkan dapat lebih berpartisipasi dalam proses pengajuan subsidi listrik dengan cara mencari informasi baik secara langsung maupun mencari informasi di media cetak atau media online. Mencari informasi secara langsung dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara menanyakannya kepada petugas di kelurahan atau datang ke PT. PLN Persero.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Natsir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Nusantara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga*, (Online) diakses 18 Oktober 2017.
- Pusat Kajian Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 18 No 2, Juli 2014.
- Rohmayani, Nala. 2016. *Perilaku Petani dalam Menghadapi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur*. (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ryff, C. D. & Keyes, C. L. M. 1995. *The Structure Of Psychological Well-Being Revisited*. *Journal Of Personality And Social Psychology*, 69, 719-727.
- Silaen, Sofar, dan Yayak Herliyanto, 2013. *Pengantar Statiskik Sosial*. Jakarta: in Medina.
- Subarna, Trisna. 2012. *Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non-Pangan Penduduk Jawa Barat*. Bandung: Peneliti Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.

Sunarti, Euis. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutannya*. Jurnal Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. ISBN 978-602-8665-05-6.

Suryabrata, Sumardi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suryono, Agus. 2014. *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Universitas Brawijaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Volume VI, Nomor 02, September 2014.

Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 Edisi delapan. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (Online), diakses 05 Desember 2017.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. (Online), diakses 25 Desember 2017.